BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Terhadap Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, yang sebagian besar hasilnya diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan, dimana pembagian dari hasil pajak bumi dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. 10% dari 100% hasil penarikan pajak tersebut diserahkan untuk pemerintah pusat.
2. Sisa 90% dibagi-bagi lagi sebagai berikut :
   a. 9% digunakan untuk biaya pemungutan. 9% tersebut diperoleh dari 10% x 90%
   b. Sisanya 81% (90% - 9%) dibagi-bagi lagi sebagai berikut :
      i. 20% x 81% = 16,20% diserahkan pada Pemerintah DT. I
      ii. 80% x 81% = 64,80% diserahkan kepada Pemerintah DT. II yang menarik pajak bumi dan bangunan tersebut

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan penulis tuangkan dalam bentuk tabel, yaitu dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta
Tahun Anggaran 1996/1997 S.D 1998/1999
(dalam rupiah)

Sektor	Th. anggaran 1996/1997	Th. anggaran 1997/1998	Th. anggaran 1998/1999	Naik (turun)			
				97/98 atas 96/97		98/99 atas 97/98	
				Rupiah	%	Rupiah	%
1. Pedesaan	969.439.756	1.359.151.221	903.170.262	389.711.465	40.2	(455.980.950)	(33.,54)
2. Perkotaan	719.644.990	792.092.575	1.762.317.754	72.447.985	10,06	970.225.170	122
3. Perkebunan	141.848.193	122.476.606	119.955.136	(19.371.587)	(13,7)	(2.521. 470)	2,05
4. Perhutanan	30.375.634	31.596.758	45.924.139	1.221.124	4,02	14.307.381	45,39
5.Pertambangan	1.500.000.000	1.257.961.503	1.307.700.000	(242.038.497)	(16,13)	49.738.497	3,95
Total	3.361.308.573	3.563.278.663	4.139.067.291	201.970.490	6	575.788.628	16,16

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diperoleh informasi mengenai perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari lima sektor yaitu :

1. Sektor pedesaan
2. Sektor perkotaan
3. Sektor perkebunan
4. Sektor perhutanan
5. Sektor pertambangan

Dalam Tabel tersebut kita akan mengetahui perkembangan sektor-sektor tersebut selama masa 3 periode berturut-turut. Perhitungan diatas penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penerimaan PBB tahun sekarang - penerimaan PBB tahun sebelumnya}}{\text{Penerimaan PBB tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan penerimaan PBB tahun 1997/1998 atas tahun 1996/1997 adalah :

$$= \frac{3.563.278.663,00 - 3.361.308.173,00}{3.361.308.173,00} \times 100\%$$

$$= \frac{201.970.490,00}{3.361.308.173,00} \times 100\%$$

$$= 6\ \%$$

Perhitungan total penerimaan PBB tahun 1998/1999 atas tahun 1997/1998 adalah :

$$= \frac{4.139.067.291,00 - 3.563.278.663,00}{3.563.278.663,00} \times 100\%$$

$$= \frac{575.788.628,00}{3.563.278.663,00} \times 100\%$$

= 16,16 %

Dari tabel 4.1 tersebut terlihat jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan menunjukkan adanya peningkatan. Dari perhitungan prosentase diatas dapat dianalisa bahwa perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten DT II Purwakarta adalah sebagai berikut:

1). Tahun 1997/1998 atas tahun 1996/1997 : rasionya sebesar 6 %.

2). Tahun 1998/1999 atas tahun 1997/1998 : rasionya sebesar 16,16 %.

Pada dasarnya penerimaan PBB tersebut mengalami peningkatan walaupun dari ketiga sektor tersebut ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Pada sektor pedesaan dalam satu tahun anggaran 1996/1997 penerimaannya sebesar Rp. 969.439.756, dalam tahun 1998/1999 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 903.170.262. Pada sektor perkotaan penerimaannya dalam tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar Rp. 719.644.590 dan pada tahun 1997/1998 naik menjadi Rp. 792.092.575 dan dalam tahun 1998/1999 mengalami kenaikan lagi yaitu menjadi Rp. 1.762.317.754. Pada sektor perkebunan dalam tahun 1996/1997 penerimaannya yaitu sebesar Rp. 141.848.193 dan tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 122.476.606 dan dalam tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan lagi yaitu menjadi Rp. 119.955.136. Pada sektor perhutanan penerimaannya yaitu sebesar Rp. 30.375.634 dalam tahun 1997/1998 penerimaannya

mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 31.596.768 dan dalam tahun 1998/1999 mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi Rp. 45.924.139. Pada sektor pertambangan penerimaannya dalam tahun 1996/1997 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 dalam tahun anggaran 1997/1998 penerimaannya mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 1.257.961.503 dan dalam tahun 1998 / 1999 mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp. 1.307.700.000.

Penjabaran :

Dari Tabel 4.1 kita bisa melihat posisi total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor pedesaan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 1.359.151.221 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 969.439.756 atau dengan perubahan rasio sebesar 40,2 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp.389.711.465.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor pedesaan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp.903.170.262 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 1.359.151.221 atau dengan perubahan rasio sebesar 33,54 %, dengan demikian adanya penurunan sebesar Rp. 455.980.950.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor perkotaan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 792.092.575 apabila dibandingkan

dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 719.644.990 atau dengan perubahan rasio sebesar 10,06 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 72.447.985.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor perkotaan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 1.762.317.754 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 792.092.575 atau dengan perubahan rasio sebesar 122 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 970.225.170.

Total penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor perkebunan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 122.476.606 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 141.848.193 atau dengan perubahan rasio sebesar 13,7 %, dengan demikian adanya penurunan sebesar Rp. 19.371.587.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor perkebunan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 119.955.136 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 122.476.606 atau dengan perubahan rasio sebesar 2,05 %, dengan demikian adanya penurunan sebesar Rp. 2.521.470.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor perhutanan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 31.596.758 apabila dibandingkan

dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 30.375.634 atau dengan perubahan rasio sebesar 4.02 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 1.221.124.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor perhutanan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 45.924.139 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 31.596.758 atau dengan perubahan rasio sebesar 45,39 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 14.307.381.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor pertambangan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 1.257.961.503 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 1.500.000.000 atau dengan perubahan rasio sebesar 16,13 %, dengan demikian adanya penurunan sebesar Rp. 242.038.497.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta sektor pertambangan yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 1.307.700.000 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 1.257.961.503 atau dengan perubahan rasio sebesar 3,95 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 49.738.497.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari lima sektor pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 3.563.278.663 apabila dibandingkan dengan

posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 3.361.308.173 atau dengan perubahan rasio sebesar 6 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 201.970.490.

Total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari lima sektor pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 4.139.067.291 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 3.563.278.663 atau dengan perubahan rasio sebesar 16,16 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 575.788.628.

Dilihat dari perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta selama 3 (tiga) periode terakhir pada umumnya terjadi kenaikan yang disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta, selain itu adanya partisipasi petugas pemungut pajak dalam melayani masyarakat yang membayar pajak dengan baik, sehingga masyarakat merasa senang untuk membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya tertib administrasi kependudukan tersebut maka akan menunjang peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2 Analisa Terhadap Perkembangan Dana Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Sesuai dengan bahasan laporan tugas akhir ini yang mambahas mengenai dana pembangunan daerah, dimana sumber dana yang didapat sebagai penerimaan di kabupaten DT. II diperoleh dari berbagai sumber berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dana pembangunan tersebut didapat :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang terdiri dari :
   a. Hasil pajak daerah
   b. Hasil perusahaan daerah
   c. Lain-lain hasil usaha daerah
2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas antara lain :
   a. Sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Pusat.
   b. Sumbangan-sumbangan lainnya yang diatur dalam Undang-undang.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan penerimaan dan pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta, dapat kita lihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Perkembangan Realisasi Dana Pembangunan
di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta
Tahun Anggaran 1996/1997 S.D 1998/1999
(dalam rupiah)

Penerimaan	Th. anggaran 1996/1997	Th. anggaran 1997/1998	Th. anggaran 1998/1999	Naik(turun)			
				97/98 atas 96/97		98/99 atas 97/98	
				Rupiah	%	Rupiah	%
1. Sisa lebih perhitungan tahun yang lalu	47.462.173,69	201.044.410,11	186.200.612,19	153.582.236,42	323	(14.843.797,92)	(7,38)
2. Bagian pendapatan asli daerah	2.757.368.210,40	4.367.031.159,42	4.889.949,08	1.609.662.949	58,38	522.918.831,66	11,97
3.Bagian Hasil bukan pajak	2.272.848.941,72	2.737.454.930,68	3.880.707.829,8	464.605.961,96	20,44	1.143.252.926,21	41,76
4. sumbangan	13.224.488.777	13.714.478.713	15.305.650.031	484.989.936,00	3,7	1.591.171.318,00	11,60
5. Uang kas perhitungan (UKP)	933.156.321,72	972.444.661,68	972.208.688,44	39.288.339,96	4,21	(235.973,2)	(0,02)
Total	19.235.324.424,53	21.992.453.847,8	25.234.717.152	2.757.192.423,3	14,33	3.242.263.304,71	14,74

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Purwakarta

Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa jumlah penerimaan dana pembangunan menunjukkan adanya peningkatan. Dari perhitungan prosentase di atas diperoleh dengan rumus sama seperti pada sub bab 4.1, sehingga dapat dianalisa bahwa perkembangan penerimaan dana pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta adalah sebagai berikut

1). Tahun 1997/1998 atas tahun 1996/1997 : rasionya sebesar 14,33 %.

2). Tahun 1998/1999 atas tahun 1997/1998 : rasionya sebesar 14,72 %.

Dari Tabel 4.2 kita bisa melihat posisi dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari sisa perhitungan tahun yang lalu yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 201.044.410,11 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 47.462.173,69 atau dengan perubahan rasio sebesar 323 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 153.582.236,42.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari sisa lebih perhitungan tahun yang lalu yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 186.200.612,19 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 201.044.410,11 atau dengan perubahan rasio sebesar 7,38 %, dengan demikian adanya penurunan sebesar Rp. 14.843.797,92.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari bagian pendapatan asli daerah yang dapat dihimpun pada akhir tahun

anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 4.367.031.159,42 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 2.757.368.210,40 atau dengan perubahan rasio sebesar 58,38 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 1.609.662.949.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari bagian pendapatan asli daerah yang dapat dihimpun pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 4.889.949,08 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 4.367.031.159,42 atau dengan perubahan rasio sebesar 11,97 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 522.918.831,66.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari bagian hasil bukan pajak pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 2.737.454.930,68 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 2.272.848.941,72 atau dengan perubahan rasio sebesar 20,44 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 464.605.961,96.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari bagian hasil bukan pajak pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp.3.880.707.829,8 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 2.737.454.930,68 atau dengan perubahan rasio sebesar 41,76 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 1.143.252.926,21.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari sumbangan pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp.

13.714.478713 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 13.224.488.777 atau dengan perubahan rasio sebesar 3,7 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 484.989.936,00.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari sumbangan pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 15.305.650.031 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 13.714.478.713 atau dengan perubahan rasio sebesar 11,60 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 1.591.171.318,00.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari uang kas perhitungan pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 872.444.661,68 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 933.156.321,72 atau dengan perubahan rasio sebesar 4,21 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 39.288.339,96.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari uang kas perhitungan pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 972.208.688,44 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 972.444.661,68 atau dengan perubahan rasio sebesar 0,02 %, dengan demikian adanya penurunan sebesar Rp. 235.973,2.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari seluruh penerimaan pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp.

21.992.453.847,8 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 19.235.324.424,53 atau dengan perubahan rasio sebesar 14,33 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 2.757.192.423,3.

Total dana pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dari seluruh penerimaan pada akhir tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 25.234.717.152 apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 21.992.453.847,8 atau dengan perubahan rasio sebesar 14,74 %, dengan demikian adanya kenaikan sebesar Rp. 3.242.263.304,71.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD), didapat bukan hanya dari pajak bumi dan bangunan saja, tetapi juga dari pajak-pajak, retribusi, dan iuran-iuran daerah lainnya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi hanya pemasukan dari pajak bumi dan bangunan saja yang paling banyak, artinya hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah tingkat II yang bersangkutan, itulah sebabnya, maka sebagian besar penerimaan pajak bumi dan bangunan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan meningkatnya penerimaan dari pajak bumi dan bangunan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat pula karena PAD merupakan sumber dana pembangunan,

sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan dana pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta. Upaya yang ditempuh oleh kabupaten DT. II Purwakarta dalam meningkatkan dana pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain :
   a. Meningkatkan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada atau yang sedang berjalan.
   b. Menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan suatu sumber pendapatan asli daerah karena bila tidak ditunjang oleh aparat yang memiliki pendidikan yang dapat diandalkan serta disiplin yang tinggi, maka akan jauh dari keberhasilan yang diharapkan bahkan peningkatan dana pembangunan pun tidak akan tercapai. Adapun pembinaan terhadap aparat tersebut dilakukan dengan cara :
   a. Memberikan penataran terhadap aparat yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan secara formal dan memberikan penataran yang berkaitan dengan tugasnya.
   b. memberikan insentif kepada setiap petugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan sesuatu sumber pendapatan asli daerah.
3. memberikan penyuluhan kepada para subyek pungutan pendapatan asli daerah baik secara langsung maupun secara simultan.

4. Mengarahkan penggunaan dari hasil pungutan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin agar tercapai tujuan sebenarnya sehingga meningkatkan dana pembangunan, misalnya dengan melalui usaha sebagai berikut :

   a. Dalam belanja rutin

   b. Dalam belanja pembangunan

4.3 Analisa Terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Dana Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Dari uraian sub bab 4.1 sampai sub bab 4.2 diatas timbul pertanyaan bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan dana pembangunan daerah di Kabupaten DT. II Purwakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara pajak bumi dan bangunan dan dana pembangunan. Kuat atau tidaknya hubungan antara pajak bumi dan bangunan dan dana pembangunan diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien (r). Untuk menghitung (r) digunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n\Sigma xiyi - \Sigma xi\Sigma yi}{\sqrt{n\Sigma xi^2 - (\Sigma xi)^2}\sqrt{\Sigma yi^2 - (\Sigma yi)^2}}$$

dimana : x = Variabel bebas

y = Variabel terikat

n = banyaknya data

r = korelasi

nilai r berkisar antara $-1 \leq r \leq 1$

r = 1 hubungan sempurna positif

r = 0 hubungan lemah

r = -1 hubungan sempurna negatif

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pajak bumi' dan bangunan dengan dana pembangunan dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hubungan Antara Pajak Bumi dan Bangunan Dan Dana Pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta

(dalam ribuan rupiah)

Waktu	n	PBB (yi)	Dana Pembangunan (xi)
1996/1997	1	3.361,34	19.235,32
1997/1998	2	3.563,26	21.992,45
1998/1999	3	4.139,09	25.234,72

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Purwakarta

Untuk menghitung r, diperlukan tabel penunjang (Worksheet) sebagai berikut :

Tabel 4.4

Worksheet Hubungan Antara Pajak Bumi dan Bangunan

dan Dana Pembangunan di Kabupaten DT. II Purwakarta

(dalam ribuan rupiah)

xi	yi	xi.yi	xi2	yi2
19.235,32	3.361,34	64.656.450,53	369.997.535,50	11.298.606,60
21.992,45	3.563,28	78.365.257,24	483.667.857,00	12.696.964,36
25.234,72	4.139,09	104.448.777,20	636.791.093,48	17.132.066,03

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Purwakarta

$$r = \frac{n\sum xiyi - \sum xiyi}{\sqrt{n\ \sum xi^2 - (\sum xi)^2}\ \sqrt{\sum (yi^2 - (yi)^2}}$$

$$r = \frac{3 \times (247.470.484,97 - 66.462,49 \times 11.063,71}{\sqrt{3 \times 1.400.456.485,98 - (66.462,49)^2} \times \sqrt{3\ (41.127.636,98) - (11.063,71)^2}}$$

$$r = \frac{742.411.454,7 - 735.321.715,24}{\sqrt{4.471.369.457,95 - 4.417.262.577,00} \times \sqrt{123.382.910,44 - 122.405.678,96}}$$

$$r = \frac{7.089.738,67}{\sqrt{54.106.880,95} \times \sqrt{977.231,98}}$$

$$r = \frac{7.089.739,67}{7.355,74 \times 988,55}$$

$$r = \frac{7.089.739,67}{7.271.520,03}$$

$$r = 0,97$$

Karena berdasarkan perhitungan diatas nilai r sebesar 0,97 maka nilai r berkisar antara -1 s/d 1 atau $-1 \leq 0{,}97 \leq 1$. Dengan demikian hubungan antara pajak bumi dan bangunan dengan dana pambangunan termasuk dalam hubungan yang sempurna positif.

Karena hubungan antara variabel-variabel kecenderungannya membentuk garis lurus, maka dapat dianggap hubungannya linier, sehingga dapat dilakukan analisis regresi linier dan pembangunan atas pajak bumi dan bangunan dengan model matematis : $y = a + bx$

$$a = \frac{(\Sigma yi)\ (\Sigma xi)^2 - (\Sigma xi)\ (\Sigma xi.yi)}{n\ (\Sigma xi^2) - (\Sigma xi)^2}$$

$$a = \frac{(11.063{,}71)\ (1.490.456.485{,}98) - (66.462{,}49 \times 247.470.484{,}97)}{3\ (1.490.456.485{,}98) - (66.462{,}49)^2}$$

$$a = \frac{16.489.978.328{,}98 - 16.447.504.632{,}78}{4.471.369.457{,}94 - 4.417.262.577{,}00}$$

$$a = \frac{42.473.695.888{,}01}{54.106.880{,}94}$$

$$a = 785$$

$$b = \frac{n\ (\Sigma xiyi) - (\Sigma xi \Sigma yi)}{n \Sigma xi^2 - (\Sigma xi)^2}$$

$$b = \frac{3\ (247.470.484{,}97) - (66.462{,}49 \times 11.063{,}71)}{3\ (1.490.456.485{,}98) - (66.462{,}40)^2}$$

$$b = \frac{742.411.454,91 - 735.321.715,2}{4.417.369.457,94 - 4.417.262.577}$$

$$b = \frac{7.089.739,7}{54.106.880,94}$$

b = 0,1310

maka : y = a + bx

y = 785 + 0,13 (x)

Berdasarkan data-data diatas bila dana pembangunan sebesar 19.235,32 maka x = 19.235,32 maka besar y adalah sebagai berikut :

y = a + bx

y = 785 + 0,13 (19.235,32)

y = 785 + 2519,83

y = 3.304,83 (dalam ribuan rupiah)

Untuk menghitung sumbangan pajak bumi dan bangunan dalam mempengaruhi peningkatan dana pembangunan digunakan rumus koefisien diterminasi yaitu :

$$CD = r^2 \times 100\%$$

telah diketahui r = 0,97 maka

$$CD = 0,97^2 \times 100\ \%$$

$$CD = 0,9409 \times 100\ \%$$

$$CD = 94,09\ \%$$

Artinya dana pembangunan dipengaruhi oleh PBB sebesar 94,09 % dan (100 - 94,09) % atau 5,91 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam tahun anggaran 1996/1997 sebesar 94,09 %.

Dengan besarnya pemasukan pajak bumi dan bangunan maka bantuan-bantuan yang diterima tiap tahun dapat diturunkan dan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan dengan adanya dana pembangunan itu. Di samping dana pembangunan daerah sendiri dapat ditingkatkan. Jadi penerimaan pajak bumi dan bangunan besar sekali pengaruhnya terhadap peningkatan dana pembangunan. Karena hasil pembagian pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun harus dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penggunaannya diselaraskan dengan pembangunan nasional yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten DT. II Purwakarta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaian pembangunan.

4.4 Hambatan dan Upaya peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan dari masyarakat di Kabupaten DT. II Purwakarta menghadapi berbagai hambatan yaitu :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang menangguhkan pembayaran pajak bumi dan bangunan sampai dengan hari jatuh tempo.
2. Masih terdapat adanya kesalahan dalam perhitungan penetapan pajak, dimana terdapat adanya perbedaan pendapat dalam penetapan nilai jual obyek pajak antara petugas pajak bumi dan bangunan dengan wajib pajak.
3. Masih terdapat adanya kesalahan dalam menentukan subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan karena terjadi perpindahan subyek dan obyek pajak yang dilaporkan.
4. Masih terdapat adanya kesalahan penggandaan pengeluaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
5. Adanya wajib pajak yang mengajukan keringanan, keberatan karena kondisi keuangan kecil.
6. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari dalam melakukan kewajibannya dalam membayar iuran pajak bumi dan bangunan.
7. Masih sulitnya merealisasikan tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, maka pemerintah Kabupaten DT. II Purwakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan telah berusaha menangani hambatan-hambatan tersebut dengan cara :

1. Memberikan penjelasan mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Memberikan informasi mengenai tata cara atau prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan mudah dan tidak akan dipersulit.
3. Melakukan perbaikan penetapan klasifikasi serta nilai jual obyek pajak sesuai dengan hasil pendataan.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pengeluaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga tidak terjadi double pengeluaran SPPT tersebut.
5. Mempercepat penyelesaian atas keringanan, keberatan dan kesalahan yang diajukan oleh wajib pajak.
6. Meningkatkan kualitas pegawai dalam melayani masyarakat yang membayar pajak.
7. Dengan diberikannya hadiah kepada wajib pajak teladan.

Pada dasarnya yang paling penting pemerintah Kabupaten DT. II Purwakarta berupaya untuk lebih meyakinkan masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak untuk membiayai kegiatan pembangunan.